



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 91 TAHUN 2025

**TENTANG
TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN MEMBANGUN TATA KELOLA
PENGADAAN DALAM AKTIVASI PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada Program Makan Bergizi Gratis, perlu dilakukan penguatan mekanisme Pengadaan Barang/Jasa untuk program tersebut;
- b. bahwa dalam rangka mengimplementasikan Proyek Perubahan pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LXII Tahun 2025, perlu dibentuk Tim Efektif Proyek Perubahan Membangun Tata Kelola Pengadaan Dalam Aktivasi Program Makan Bergizi Gratis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Efektif Proyek Perubahan Membangun Tata Kelola Pengadaan Dalam Aktivasi Program Makan Bergizi Gratis;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN MEMBANGUN TATA KELOLA PENGADAAN DALAM AKTIVASI PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS.

KESATU : Menetapkan Tim Efektif Proyek Perubahan Membangun Tata Kelola Pengadaan Dalam Aktivasi Program Makan Bergizi Gratis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Efektif Proyek Perubahan Membangun Tata Kelola Pengadaan Dalam Aktivasi Program Makan Bergizi Gratis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana dan melaksanakan Proyek Perubahan Membangun Tata Kelola Pengadaan Dalam Aktivasi Program Makan Bergizi Gratis; dan
- b. melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait Program Makan Bergizi Gratis.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 04 JULI 2025

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN

PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum, Organisasi dan

Sumber Daya Manusia LKPP,



Arif Rachman

Tembusan:

1. Kepala Lembaga Administrasi Negara; dan
2. Kepala Badan Gizi Nasional.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM EFEKTIF
PROYEK PERUBAHAN MEMBANGUN TATA
KELOLA PENGADAAN DALAM AKTIVASI
PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS

NOMOR : 91 TAHUN 2025

TANGGAL : 04 JULI 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN MEMBANGUN TATA KELOLA
PENGADAAN DALAM AKTIVASI PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Peran dan Tugas
1.	Pengarah	Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Mentor Proyek Perubahan
2.	Ketua	Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia	Pelaksana Proyek Perubahan
3.	Anggota	Tim Efektif Pokja I Pemenuhan SDM Pengadaan 1. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia; 2. Miftah Irfaniah (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya); 3. Yohana Surat Payon Philips (Analisis Kebijakan Ahli Madya); dan 4. Rasmita Juliana Sitepu (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda).	 1. Penyiapan kerangka Nota Kesepemahaman antara LKPP dengan Badan Gizi Nasional; 2. Penyusunan <i>Policy Brief</i> untuk Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang kompeten; 3. Penyiapan kerangka penetapan kebutuhan

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Peran dan Tugas
		Tim Efektif Pokja II Pengembangan Kompetensi SDM 1. Kepala Pusat Pelatihan Barang/Jasa Pemerintah; 2. Direktur Sertifikasi Profesi; 3. Harry Sri Kahartan Kusuma Wijaya (Widyaiswara Ahli Madya); 4. Umi Nurnaeni (Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya); 5. Tri Susanto (Widyaiswara Ahli Madya); 6. Lulu Haryani (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda); 7. Ingarrestu Pradiptaningtyas (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda); 8. Eva Nurdinna Agustini (Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama); dan 9. I Nyoman Aditya Wicaksana (Pengolah Data dan Informasi).	jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Badan Gizi Nasional. 1. Penyiapan perangkat pembelajaran tentang Pengadaan Barang/Jasa bagi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis; 2. Pelaksanaan pengembangan kompetensi bagi para pemangku kepentingan dengan cara pelatihan; 3. Pelaksanaan uji kompetensi Pelaku Pengadaan di Badan Gizi Nasional (BGN) yang terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis; 4. Pemantauan dan evaluasi pengembangan kompetensi dan uji kompetensinya.

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Peran dan Tugas
		Tim Efektif Pokja III Kelembagaan Pengadaan 1. Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan; 2. Thanthawi Jauhari (Analisis Kebijakan Ahli Madya); 3. Linggar Lailatussa'adah Inhardy (Analisis Kebijakan Ahli Muda); dan 4. Dita Prima Trihapsari (Analisis Kebijakan Ahli Pertama).	1. Penyiapan kerangka kebijakan kelembagaan Unit Kerja PBJ di Badan Gizi Nasional; 2. Penyusunan <i>Policy Brief</i> untuk pembentukan Satuan Pelaksana di Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG); 3. Pendampingan pengukuran maturitas kelembagaan Unit Kerja PBJ di Badan Gizi Nasional.
		Tim Efektif Pokja IV Hubungan Masyarakat dan Dokumentasi 1. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum; 2. Mexi Osmond Soyan (Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama); 3. Yoga Nurdani (Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama); 4. Setiaji Santoso (Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama); 5. Daniel Febrian Triyanto (Penyedia Jasa Lainnya); dan	1. Penyiapan perangkat komunikasi publik terkait dengan program dalam proyek perubahan; 2. Pembuatan konten kreatif untuk komunikasi publik terkait dengan proyek perubahan; 3. Penyebarluasan informasi terkait dengan proyek perubahan.

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Peran dan Tugas
		6. Rolland Sukma Guritno (Penyedia Jasa Lainnya).	

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI